

Editorial (94)

Masalah pendidikan termasuk pemberian gelar akademiknya yang “kacau” ternyata tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi baru-baru ini juga mencuat di Amerika Serikat. Seperti kita ingat berganti-gantinya kebijakan yang berwenang membuat para pemerhati hanya bisa prihatin. Contoh-contoh berikut hanyalah sebagian kecil dari “kekacauan” tersebut. Gelar M.Psi. pernah diberikan oleh Fak. Psikologi Universitas Indonesia kepada siapa saja yang lulus pendidikan S-2 psikologi UI, baik yang S1-nya dari fakultas psikologi maupun bukan (misalnya dari pendidikan Bimbingan & Konseling IKIP, Sosiologi, atau bahkan dari S1 Bahasa Inggris). Keadaan itu beberapa tahun yang lalu diubah, yaitu M.Psi. hanya boleh dipakai oleh lulusan S-2 Psikologi yang mengambil program *double degree* Magister Psikologi dan Psikolog dan hanya untuk yang S1-nya Sarjana Psikologi. Putusan yang masuk akal, namun bagaimana yang terlanjur bukan psikolog? Mereka dilarang menggunakan gelar yang pernah diperolehnya secara sah, tetapi sampai saat ini tak ada surat pencabutan/atau penggantian atau ralat formal! Siapa yang berwenang melarang? Seyogianya lembaga yang mengeluarkan gelarlah yang menyelesaikan ini!

Sampai hari ini pun ternyata masih ada juga program studi psikologi yang memberikan gelar M.Psi. untuk yang bukan lulusan S1 psikologi. Lulusan program S2 psikologi UGM pernah dianugerahi gelar SU (Sarjana Utama); rupanya kebijakan itu pun tak bertahan lama, karena kemudian lenyap dan muncul M.Si. sebagai gantinya. Ternyata ini pun kini sudah berubah lagi menjadi M.A. bagi lulusan S2 psikologi, yang S1-nya bukan psikologi. Di luar disiplin psikologi keadaannya juga tak mulus. Ada pendidikan S2 untuk lulusan fakultas hukum yang diberi gelar M.Hum. (Magister Humaniora), namun kemudian muncul juga M.H. (Magister Hukum). Dulu lulusan S1 program studi farmasi dianugerahi Sarjana Sains (S.Si.) yang juga tak langgeng karena kini berubah menjadi S.Farm. (Sarjana Farmasi).

Kita masih boleh berbesar hati karena di USA pun pada awal tahun yang baru lewat mencuat masalah hak menggunakan gelar “Dr.” Menurut Anderson dalam Monitor 39(8), September 2008, APA (American Psychological Association) telah dua kali melayangkan surat ke editor Associated Press (AP) yang bertanggung jawab akan *Stylebook* (standar yang paling banyak dipakai para editor surat kabar) agar mempertimbangkan

kebijakan memakai istilah terhormat “Dr” hanya untuk para MD (dokter), dokter gigi, doktor osteopathy dan doktor podiatric medicine (pendidikan kedokteran tetapi terbatas masalah kaki saja). APA minta agar kehormatan itu juga diberikan kepada psikolog yang bertingkat doktoral agar menghilangkan kebingungan di antara masyarakat dan demi keakuratan. APA melaporkan bahwa banyak orang menganggap dirinya sebagai psikolog tanpa memiliki gelar setingkat PhD. Selain itu ada praktisi kesehatan mental yang sama sekali bukan psikolog—para pekerja sosial dan konselor, misalnya—yang sering diberitakan sebagai terapis sebagaimana psikolog yang bergelar PhD. APA juga menggarisbawahi pendidikan dan pelatihan ekstensif para psikolog dan bahwa para praktisi psikologi masih harus memperoleh lisensi oleh negara bagiannya.

Sayang sekali menurut Anderson (yang APA *chief executive officer*), respons AP mengecewakan karena mengatakan bahwa para psikolog memperoleh gelar PhD dan merupakan gaya AP untuk memakai “Dr” hanya untuk mereka dengan gelar kesehatan. Para PhD itu dikenali dalam berita-berita AP sebagai psikolog, sehingga tak akan ada kesalahpahaman di masyarakat. Jadi aturan itu tampaknya tak akan berubah. APA tetap menekan untuk terjadinya perubahan sesuai pendiriannya. Para psikolog yang melakukan wawancara media dapat meminta para reporter agar menggunakan “Dr” untuk mengidentifikasi mereka.

Mudah-mudahan akhirnya nanti AP bersedia mengubah kebijakannya yang membatasi penggunaan “Dr” hanya untuk dokter, dokter gigi, dokter osteopathy, dan dokter podiatri. Apalagi, AMA (American Medical Association) menolak suara-suara yang menghendaki pembatasan penggunaan “Dr” tersebut. Selain itu di banyak negara Eropa dan lainnya pun para psikolog dengan pendidikan PhD sudah dikenali sebagai “doctor.”

Keadaan di atas mengingatkan penyunting akan tuntutan agar Peneliti Utama (yang tingkatannya sudah setara dengan profesor) menuntut jabatan akademik profesor, walaupun tak mengajar, padahal profesor adalah jabatan akademik untuk pengajar (seperti lektor kepala, lektor dan asisten ahli). Tentu lobinya cukup kuat sehingga kini dikenal juga Profesor Riset. Tampaknya gelar masih menjadi dambaan banyak pakar untuk mengaktualisasi dirinya.

Penyunting